



Siaran Pers

Pengadilan Distrik Dili

07 Juni 2019

Pengadilan merujuk terdakwa yang tidak cakap hukum karena menderita sakit jiwa ke penjara: JSMP mendesak Pemerintah mendirikan tempat khusus untuk penderita sakit jiwa

JSMP telah mengamati bahwa selama beberapa bulan terakhir, Pengadilan Distrik Dili terus mengirim para terdakwa ke penjara yang tidak mampu karena gangguan psikologis. Menurut hukum, terdakwa seperti ini dikecualikan dari tanggung jawab pidana karena mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pada tanggal 7 April 2019, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang untuk mengumumkan putusnya dalam kasus pembunuhan berat yang melibatkan terdakwa NF yang diduga melakukan pelanggaran terhadap anak dan istrinya, di Distrik Likisa. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa menderita sakit jiwa¹ ketika ia melakukan kejahatan ini tetapi pengadilan masih mengirim terdakwa ke penjara selama tiga tahun. Pengadilan memutuskan untuk mengirim terdakwa kembali ke penjara untuk menjamin bahwa terdakwa dapat menerima perawatan medis sampai ia sembuh dari penyakit tersebut.

Sebelumnya pada tanggal 12 Februari 2019, Pengadilan Distrik Dili juga mengeluarkan keputusan serupa terhadap terdakwa PE atas kejahatan pelanggaran sederhana terhadap integritas fisik yang ditandai sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan menjatuhkan hukuman efektif 1 tahun penjara terhadap terdakwa².

“Putusan yang dikeluarkan dalam dua kasus ini berpotensi melanggar aturan umum dan prinsip-prinsip hukum pidana, terutama mengenai pengecualian tanggung jawab pidana bagi mereka yang menderita penyakit mental pada saat mereka melakukan kejahatan,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Pasal 21 (1) dan (2) KUHP tentang pembebasan dari tanggung jawab pidana karena alasan jiwanya terganggu atau sakit jiwa menyatakan bahwa:

(1) Seseorang dibebaskan dari tanggung jawab pidana jika, karena gangguan mental, ia tidak mampu, pada saat melakukan tindakan, untuk memahami pelanggaran hukumnya atau untuk memutuskannya.

¹Berdasarkan keterangan korban dan laporan/keterangan dokter spesialis penyakit mental/jiwa

² Untuk informasi lebih detail tolong baca Ringkasan Kasus di Pengadilan Distrik Dili-Februari 2019 di website.jsmp.tl

2. Seseorang dapat dinyatakan dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana ketika, dengan kekerasan mental, pada saat kejahatan dilakukan, secara signifikan berkurang kapasitasnya untuk menghargai pelanggaran hukum atas tindakan semacam itu atau untuk bertindak sesuai dengan itu.

JSMP memahami bahwa saat ini belum tersedia fasilitas/tempat yang khusus untuk orang yang sakit mental; namun penjara bukan tempat yang tepat bagi orang-orang yang sakit jiwa untuk menjalani perawatan terhadap kesehatan jiwa mereka.

JSMP percaya bahwa dalam keadaan seperti itu, terutama karena ada banyak kekurangan, para hakim dihadapkan pada posisi yang serba sulit sesuai dengan kondisi dari masing-masing. Namun, ini tidak berarti bahwa hakim dapat membuat keputusan yang tidak sesuai dengan hukum. Meskipun putusan-putusan yang dikeluarkan oleh para hakim ini menyatakan bahwa para terdakwa dikirim ke penjara untuk mendapatkan perawatan sampai mereka dapat pulih, batas waktu yang dijatuhkan selama tiga tahun atau satu tahun memberikan kesan bahwa para terdakwa dihukum, bukan waktu untuk perawatan. Bagaimana mungkin seorang hakim dapat memprediksi bahwa dalam waktu satu atau tiga tahun seorang terdakwa akan dapat pulih dari penyakit mental/jiwanya? Secara harfiah, penjara adalah tempat untuk menghukum orang terpidana, dan bukan tempat untuk mengobati/merawat orang sakit.

JSMP memahami bahwa pengadilan telah memutuskan untuk mengirim terdakwa ke penjara karena mereka dapat menimbulkan risiko bagi orang lain jika dikembalikan ke masyarakat. Namun, JSMP percaya bahwa penjara bukanlah tempat bagi para terdakwa dalam kasus sejenis ini, karena kondisinya sedemikian rupa sehingga mereka membutuhkan tempat khusus yang tenang, ramah dan mudah diakses. Juga, tempat yang harus memungkinkan keluarga untuk mengunjungi secara bebas dan bagi profesional kesehatan dapat memberikan perawatan dan konseling rutin untuk membantu para terdakwa pulih dengan cepat.

JSMP percaya bahwa situasi ini muncul karena kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Solidaritas Sosial gagal mengidentifikasi kebutuhan khusus dalam kasus-kasus seperti ini. Hingga saat ini pemerintah belum mendirikan klinik atau tempat yang tepat untuk pasien yang menderita sakit jiwa/mental, terutama mereka yang menderita kondisi serius. Meskipun terdapat dokter yang berspesialisasi dalam menangani pasien yang menderita penyakit mental, namun tidak termasuk mereka yang menderita kondisi serius. Contoh konkretnya adalah bahwa banyak pasien sakit jiwa yang kini berkeliaran di masyarakat dan mereka berpotensi menimbulkan risiko dan mengancam keamanan masyarakat.

Dalam kasus-kasus dengan keadaan khusus seperti ini, ketika hakim hendak membuat putusan, perlu untuk mendengarkan pendapat, dan berkonsultasi dengan, para profesional kesehatan/dokter ahli dan petugas dari Menteri Solidaritas Sosial untuk menemukan solusi kolektif berdasarkan persyaratan dari masing-masing kasus. Pengadilan perlu menghindari memprediksi atau menafsirkan keadaan yang berada di luar kompetensi profesional mereka.

JSMP merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera mendirikan fasilitas khusus dan tepat seperti ini untuk menghindari situasi dimana menempatkan hakim dalam posisi yang sulit.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Email: luis@jsmp.tl

Situs web: <http://jsmp.tl/>